



# 2014

## Laporan Kinerja Layanan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

## KATA PENGANTAR

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah satuan kerja pada Kementerian Keuangan R.I. yang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan LPDP sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK BLU. LPDP bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (Endowment Fund) maupun Dana Cadangan Pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai satuan kerja yang menerapkan PPK BLU dan merupakan instansi pemerintah non eselon pada Kementerian Keuangan maka LPDP wajib membuat Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2014.

Pada tahun 2014, sesuai dengan arahan Dewan Penyantun, LPDP tetap melakukan pengembangan dana kelolaan pada instrumen dengan risiko rendah, untuk mendapatkan *return* berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sama seperti tahun sebelumnya, PNBP tersebut selanjutnya disalurkan dalam bentuk layanan beasiswa, layanan dana riset dan dana cadangan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pertumbuhan layanan LPDP dari tahun sebelumnya dirasa sangat signifikan dengan rata-rata capaian di atas 120%.

Pada tahun 2015, LPDP diharapkan dapat terus meningkatkan target kuantitas dengan tetap menjaga kualitas. Melalui tema “service excellence”, LPDP diharapkan dapat menjadi lembaga pengelola dana terbaik di Indonesia.

Jakarta, Januari 2015  
Direktur Utama

Eko Prasetyo  
NIP. 197007121989121001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dibentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan LPDP pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU, LPDP ditetapkan sebagai BLU penuh.

Laporan Kinerja (LAKIN) LPDP tahun 2014 disusun berdasarkan realisasi dari target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) LPDP dan Kontrak Kinerja LPDP tahun 2014. RBA LPDP tahun 2014 berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran LPDP tahun 2014.

Pada tahun 2014, LPDP memiliki 9 Sasaran Strategis (SS) dengan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sembilan SS dan 18 IKU ini, terbagi dalam 3 perspektif *balance scorecard* yaitu *Stakeholder/Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU), 15 IKU berstatus hijau, dan hanya 3 IKU yang berstatus kuning. Sehingga Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LPDP pada tahun 2014 sebesar 108,81%, naik 6,38% dari NKO tahun lalu yang sebesar 102,43%. IKU yang berstatus hijau diantaranya adalah persentase pencapaian target layanan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional, penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja, serta opini atas laporan keuangan, masing-masing mencapai 143,84%, 100,09%, dan 120% (WTP). Pada layanan beasiswa, dari target 2.032 Penerima, terealisasi 3.025 Penerima, atau sebesar 148,86% dari target. Pada layanan dana riset, dari target 21 Proposal, tercapai 27 Proposal, atau 128,57% dari target. Pada layanan investasi, dari target Rp1.100 M, terealisasi Rp1.671,06 M atau 151,91 % dari target. Selain itu, tingkat pertumbuhan pendaftar pada tahun 2014, meningkat sebesar 64,86% (33.896 Pendaftar), dari tahun 2013, yaitu sebesar (20.560 Pendaftar).

IKU yang berstatus kuning adalah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, Tingkat kelulusan tepat waktu, dan Indeks Kesehatan Organisasi. Pada IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, LPDP mendapatkan penilaian 3,97 dari target 4,02. Survey dilaksanakan secara online, dan FGD / In Dept Interview di beberapa kota besar di Indonesia, seperti: Jakarta, Bogor, Bandung, Makasar, Yogyakarta, dan Surabaya. Layanan yang disurvei adalah layanan beasiswa dan layanan dana riset, dengan

capaian masing-masing 3,97 dan 3,79. Pada IKU Tingkat kelulusan tepat waktu, dari target 100%, pada tahun 2014, LPDP baru mencapai rata-rata 96,55%. Pada IKU Indeks Kesehatan Organisasi, LPDP baru mencapai 59 dari target 68 (skala 100). IKU Indeks Kesehatan Organisasi ini merupakan IKU Mandatory dari unit eselon 1.

Pada 30 Januari 2015, LPDP berulang tahun yang ke 3. Di usianya yang ke-3, LPDP berhasil membuktikan eksistensinya baik ditingkat nasional maupun internasional. Capaian ini melewati rencana strategis yang sudah disusun diawal pendiriannya. Pada dinamikan yang ada, LPDP terus berproses melakukan perbaikan dan perbaikan keorganisasian secara internal, dengan tetap memberikan kinerja prima dan output layanan terbaik. Tahun 2015, *Service Excellence!*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
B. PERAN DAN ISU STRATEGIS 2015 .....	6
C. SISTEMATIKA LAPORAN .....	6
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	8
B. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....</b>	<b>13</b>
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2013 .....	14
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA TAHUN 2013 .....	14
C. KINERJA LAINNYA.....	25
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2013.....	29
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik Dana Abadi Pendidikan (*Endowment Fund*) maupun Dana Cadangan Pendidikan. Pengelolaan tersebut meliputi pengembangan dana dan penyaluran dana baik untuk kegiatan pendidikan, berupa beasiswa dan riiset, maupun untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

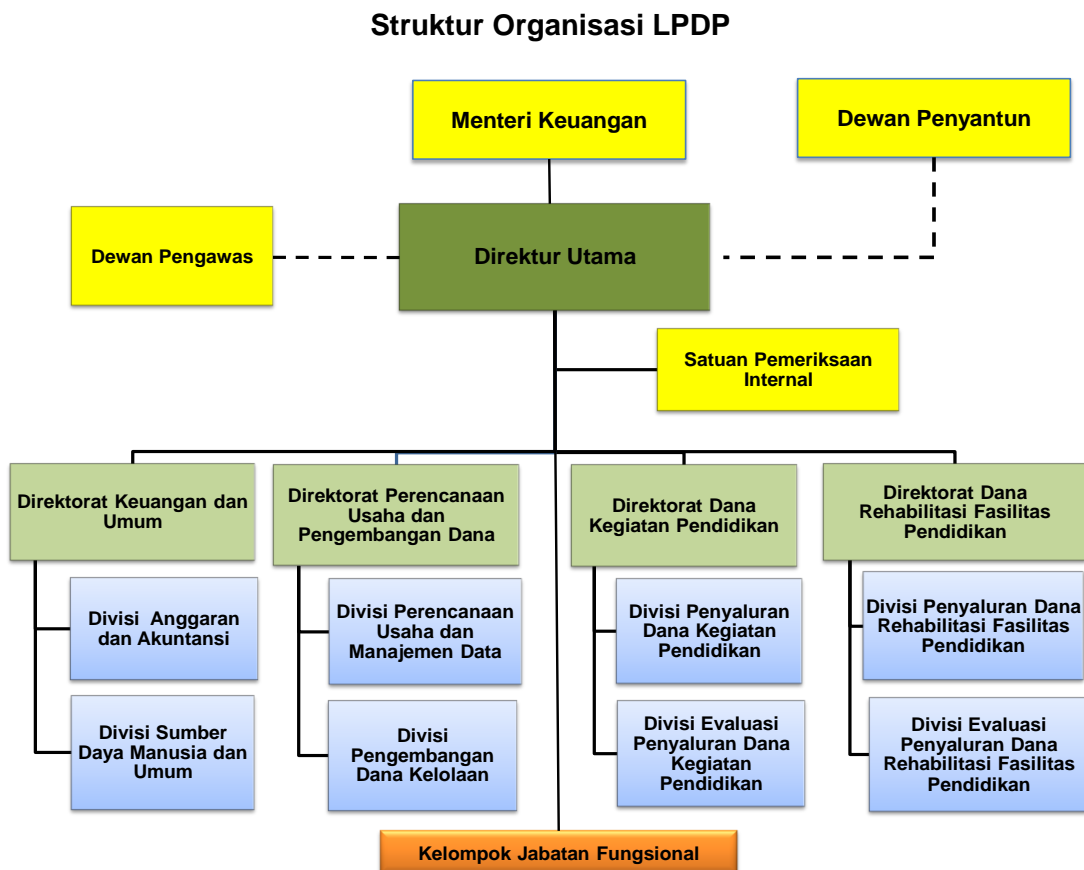
1. Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
2. Pengelolaan dan pengembangan dana *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan;
3. Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional serta monitoring dan evaluasi atas penyaluran;
4. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan;
5. Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan
6. Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdiri atas:

1. Direktorat Keuangan dan Umum;
2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana;
3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan;
4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan;
5. Satuan Pemeriksaan Intern; dan

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan DPPN, di luar struktur tersebut, LPDP dilengkapi dengan Dewan Penyantun dan Dewan Pengawas. Dewan Penyantun terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Adapun struktur organisasi LPDP dapat digambarkan sebagai berikut:



### 1. Direktorat Keuangan dan Umum

Direktorat Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan renstra, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, serta urusan umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Direktorat Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
- b. Pengelolaan anggaran dan keuangan;

- c. Penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi;
- d. Pelaksanaan setelmen;
- e. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Direktorat Keuangan dan Umum terdiri dari dua divisi, yaitu:

- a. Divisi Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran operasional dan pelaksanaan setelmen, penyusunan sistem dan manual akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja organisasi.
- b. Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan.

## **2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana**

Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis, penyusunan rencana bisnis tahunan, pengembangan dana kelolaan dan pendapatan, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data.

Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis dan rencana bisnis tahunan;
- b. Penyiapan pengembangan dana kelolaan dan hasil pendapatan;
- c. Pengelolaan kerja sama pendanaan;
- d. Penyiapan penyusunan rencana penyaluran dana; dan
- e. Riset dan manajemen data.

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Dana terdiri atas:

- a. Divisi Perencanaan Usaha dan Manajemen Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan

usaha berupa rencana strategis bisnis dan rencana bisnis tahunan, koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana, riset, pengelolaan data dan informasi, serta pelaporan usaha.

- b. Divisi Pengembangan Dana Kelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan dana kelolaan dan hasil pendapatan, dan pengelolaan kerja sama pendanaan.

### **3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan**

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan, penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana kegiatan pendidikan.

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan;
- b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan dan penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan; dan
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana kegiatan pendidikan.

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan terdiri atas:

- a. Divisi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan dan menyalurkan dana untuk kegiatan pendidikan.
- b. Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana beasiswa.

### **4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan**

Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam, verifikasi dan penilaian atas proposal, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam.

Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam;
- b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal, serta penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam; dan
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan terdiri atas:

- a. Divisi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal rehabilitasi fasilitas pendidikan, menyalurkan dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan.
- b. Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam.

## **5. Satuan Pemeriksaan Internal**

Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Fungsi Satuan Pemeriksaan Intern adalah:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan *audit charter* dan *audit program*;
- b. pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan
- c. Melakukan reviu terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pejabat Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **7. Dewan Pengawas**

Dalam PP. No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pasal 34 diatur bahwa untuk melaksanakan pengawasan BLU dapat

membentuk Dewan Pengawas. Dalam Tata Kelola LPDP diatur, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pengelolaan *endowment fund* dan dana cadangan pendidikan yang dilakukan oleh Direksi;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis (Renstra) yang dilakukan oleh Direksi;
- c. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) oleh Direksi; dan
- d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

#### **8. Dewan Penyantun**

Dalam PMK nomor 252/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP pasal 32 disebutkan bahwa Dewan Penyantun LPDP yang terdiri atas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama akan mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan PMK nomor 252/PMK.01/2012 dimaksud.

### **B. PERAN DAN ISU STRATEGIS 2014**

Peran strategis LPDP sebagaimana yang tertuang ke dalam tujuan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang telah dirumuskan dan dituangkan juga dalam RBA LPDP tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Tersalurkannya DPPN bagi keberlangsungan program pendidikan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan;
2. Terjaminnya keberlangsungan pendanaan bagi program pendidikan generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*).

### **C. SISTEMATIKA LAPORAN**

Laporan Kinerja (LAKIN) LPDP tahun 2014 ini dibagi dalam empat bab yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi LPDP, peran dan isu strategis 2015 LPDP, dan sekilas pengantar lainnya.

#### **BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhtisarkan mengenai rencana strategis antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program instansi dan penetapan/perjanjian kinerja LPDP yang berisikan sasaran strategis LPDP, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2014.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis kinerja, dan akuntabilitas keuangan berupa alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk program/kegiatan.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja serta strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang.

### **LAMPIRAN**

## BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

#### 1. Visi

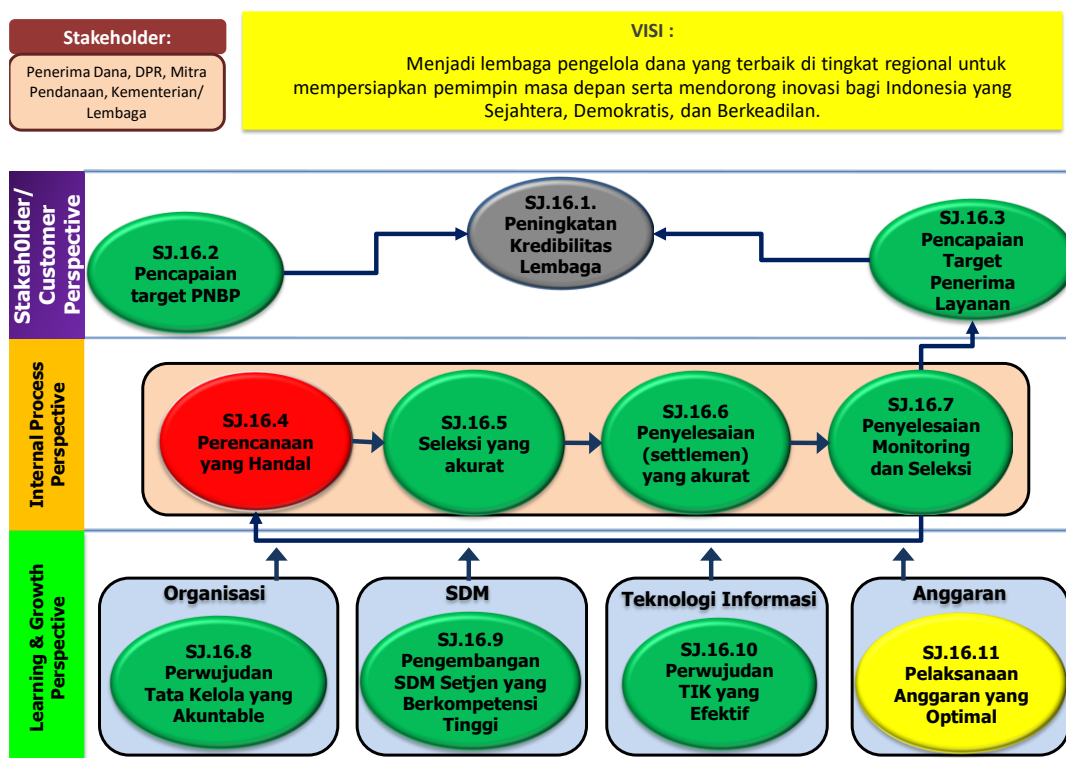
Menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

#### 2. Misi

1. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan.
2. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset.
3. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal.
4. Sebagai *last resort*, mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan.

#### 3. Peta Strategis

Peta Strategis yang menggambarkan Sasaran Strategis LPDP pada tahun 2013, sebagai berikut:



#### 4. Program

Pada bulan April 2013, LPDP sudah memberikan layanan penyaluran dana pendidikan, baik untuk pemberian beasiswa, thesis dan disertasi, rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, dan kegiatan penelitian. Guna memberikan *brand* terhadap layanan beasiswa LPDP, layanan beasiswa LPDP berubah nama menjadi Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Pemberian beasiswa tersebut difokuskan untuk Program Magister (S2) dan Doktor (S3) di dalam dan luar negeri. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak SDM dengan pendidikan S2 dan S3 sebagai penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Mekanisme pengajuan beasiswa dilakukan secara *online* guna melakukan automasi layanan.

Pemberian beasiswa tersebut lebih difokuskan untuk program studi teknik, sains, pertanian, hukum, ekonomi dan keuangan serta agama. Fokus tersebut diambil dengan pertimbangan pemberian beasiswa dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun wilayah pada 6 (enam) koridor pembangunan ekonomi sesuai program *Master Plan* Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan kebijakan ini diharapkan pemberian beasiswa ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Untuk mempercepat penyaluran, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis;
- b) Sosialisasi ke beberapa perguruan tinggi di beberapa daerah.

Sementara itu, program pendanaan penelitian yang awalnya bernama Riset Inovatif Produktif (RISPRO), berubah nama menjadi Riset Pembangunan Indonesia. Layanan Pendanaan Riset LPDP merupakan tanggapan atas penancangan 6 (enam) bidang strategis nasional oleh Presiden RI pada tahun 2008, yang memerlukan riset intensif untuk mengatasi berbagai masalah bangsa Indonesia. Dari keenam bidang strategis tersebut dipilih 4 (empat) bidang yang membutuhkan perhatian yang lebih dibanding bidang yang lainnya, yaitu pangan, energi, tata kelola, dan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (*eco-growth*). Kegiatan Riset Pembangunan Indonesia LPDP secara spesifik meliputi:

- a) penguatan penguasaan teknologi nasional bagi periset;
- b) memberi dukungan bagi pertumbuhan industri strategis atau kelompok usaha kecil dan menengah dengan teknologi yang sudah dihasilkan oleh para periset dengan pola kerja sama yang saling memberi manfaat;
- c) meningkatkan pengelolaan lembaga pemerintah maupun swasta secara transparan dan akuntabel.

Sedangkan penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam akan difokuskan pada 4 (empat) daerah rawan bencana yaitu Aceh, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua Barat. Dalam pelaksanaannya LPDP dapat menjalin kerja sama dengan pihak-pihak seperti Pemerintah Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial. Guna mempersiapkan pelaksanaan penyaluran apabila setiap saat harus diperlukan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan umum, petunjuk teknis dan peta bencana;
- b) Sosialisasi ke beberapa daerah rawan bencana.

## **B. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA**

### **1. Penjelasan Sasaran Strategis**

#### a. *Stakeholder / Customer Perspective*

*Balance Scorecard* dibangun dari studi pengukuran kinerja pada sektor bisnis / lembaga profit, sehingga perspektif paling atas adalah perspektif financial dan customer. Pada LPDP yang merupakan Lembaga non-profit, Perspektif ini diubah menjadi sudut pandang stakeholder dan customer. Pada sisi stakeholder, perspektif ini dibaca oleh organisasi sebagai “apa yang harus dicapai organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder”. Misalnya stakeholder menginginkan tingkat laba tinggi yang diukur dengan *return on investment*, *return on asset* atau profit *margin*. Selain itu, pada sisi customer, perspektif ini dibaca oleh organisasi sebagai, “apa yang harus dicapai organisasi agar memenuhi keinginan customer, atau apa yang diinginkan customer untuk dipenuhi organisasi”. Misalnya pelanggan menginginkan pelayanan yang baik, yang diukur dengan indeks kepuasan pelanggan.

Pada *Stakeholder/Customer Perspective* terdapat 3 Sasaran Strategis, yaitu Peningkatan Kredibilitas Lembaga, Pencapaian Target PNBPN, serta Pencapaian Target Penerima Layanan. Sasaran Strategis ini merupakan upaya LPDP untuk memenuhi ekspektasi/harapan dari *stakeholder/customer* LPDP. Pemenuhan ekspektasi/harapan dari *stakeholder/customer*, harapannya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kredibilitas LPDP sebagai sebuah lembaga. Sasaran Utama LPDP yaitu Peningkatan Kredibilitas Lembaga, dibuktikan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama yang bersifat *Exact* dan *Low* yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan target 4,02 (skala 5). Adapun IKU Persentase Pencapaian Target PNBPN dalam DIPA dengan target 100% atau senilai dengan Rp 934.749.673.000,00, dan Persentase Pencapaian Target Penerima Layanan dengan target 80%, merupakan Indikator Kinerja Utama untuk menggambarkan tercapai tidaknya Sasaran Strategis Pencapaian Target PNBPN dan Pencapaian Target Penerima Layanan.

#### b. *Internal Process Perspective*

Perspektif ini adalah sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis utama di dalam organisasi. Proses bisnis adalah

serangkaian/sekumpulan aktivitas inti yang saling berhubungan satu sarana lain, yang dilakukan organisasi dalam rangka menciptakan produk/jasa untuk memenuhi keinginan pelanggan atau *shareholder*. Misalnya perusahaan menginginkan proses produksi yang optimal, diukur dengan persentase produk yang gagal dalam proses produksi.

Pada *Internal Proccess Perspective*, LPDP memiliki 4 Sasaran Strategis, yaitu Perencanaan yang Handal, Seleksi yang Akurat, Penyelesaian (Settlement) yang Akurat, serta Efektifitas Monitoring dan Evaluasi. Sama halnya dengan *Stakeholder/Customer Perspective*, pada Sasaran Strategis *Internal Proccess Perspective* terdapat masing-masing 1 IKU untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian. Sasaran Strategis ini merupakan gambaran atau alur sistem manajemen pada sebuah organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Keberhasilan pada tahap perencanaan, digambarkan dengan pencapaian IKU Persentase Realisasi Anggaran Program dengan target 85% atau sebesar Rp295.161.880.000,00. Pada tahap pelaksanaan, terdapat 2 bagian yaitu bagian seleksi dan bagian *settlement*. Guna menggambarkan Sasaran Strategis pada tahap ini, terdapat 2 IKU yaitu Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis dalam Penyaluran Dana dengan target 100% dan Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Proses Seleksi dengan target 100%. Adapun pada tahap akhir, terdapat IKU Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimum Layanan Program dengan target 80%, guna menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Efektifitas Monitoring dan Evaluasi.

### **c. *Learning and Growth Perspective***

Perspektif ini adalah sudut pandang organisasi yang berfokus pada sumber daya internal organisasi. Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan penguatan sumber daya internal organisasi agar mampu menjalankan proses bisnis utama organisasi. Kestinambungan suatu organisasi dalam jangka panjang sangat bergantung pada perspektif ini.

Pada *Internal Proccess Perspective*, LPDP menargetkan 4 Sasaran Strategis, yaitu SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi, Perwujudan SDM yang berkompetensi tinggi, Perwujudan tata kelola TIK yang efektif dan

Pelaksanaan Anggaran yang Optimal. Pada Sasaran Strategis SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi, LPDP memiliki 5 IKU yaitu Jumlah SOP/Pedoman Kerja Baru yang Ditetapkan (target 41 dokumen), Penyelesaian *Good Corporate Governance (GCG) Charter* (target 1 dokumen), Persentase Implementasi Sistem Pengelolaan Kinerja (target 100%), Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Penugasan/Instruksi Pimpinan (target 85%) dan Persentase Mitigasi Risiko yang selesai Dilaksanakan (target 90%). Pada Sasaran Strategis Perwujudan SDM yang berkompetensi tinggi dan Perwujudan tata kelola TIK yang efektif, terdapat masing-masing 1 IKU yaitu Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat (target 50%) dan Jumlah Modul Sistem Informasi yang Mendukung Proses Bisnis (target 9 modul). Pada Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang Optimal yang merupakan mandatory dari Setjen terdapat 2 IKU yaitu Persentase Penyerapan DIPA LPDP (Non Belanja Pegawai dan Non Belanja Program) dengan target 95% dan Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA LPDP dengan target 98%.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

## A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SJ-16.1 Peningkatan Kredibilitas Lembaga	SJ-16.1.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan*	4,2	-	-
2.	SJ-16.2 Pencapaian Target PNBP	SJ-16.2.1 Persentase Pencapaian Target PNBP dalam DIPA	100%	106,01%	106,01%
3.	SJ-16.3 Pencapaian Target Penerima Layanan	SJ-16.3.1 Persentase Pencapaian Target Penerima Layanan	80%	124,85%	156,06%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA TAHUN 2013

### 1. Sasaran Strategis (SS) 1 : Peningkatan Kredibilitas Lembaga (SJ-16.1)

*Indikator Kinerja Utama (IKU):* Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Pada tahun 2013, LPDP menargetkan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 4,02 (skala 5), dengan capaian IKU abu-abu. Jika sesuai dengan rencana awal, survei kepuasan pengguna layanan LPDP dilaksanakan dibawah koordinasi Biro Organta Setjen. Namun belakangan diketahui bahwa LPDP tidak jadi disurvei, dikarenakan menurut penjelasan dari Biro Organta dan Tim Kinerja Setjen, survei yang dilakukan pada tahun 2013 merupakan survei untuk menilai Kinerja Layanan pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2012 belum terdapat Layanan pada LPDP.

### 2. Sasaran Strategis (SS) 2 : Pencapaian Target PNBP

*Indikator Kinerja Utama (IKU):* Persentase Pencapaian Target PNBP dalam DIPA.

Pada IKU Persentase Pencapaian Target PNBP dalam DIPA, sampai dengan Triwulan IV, LPDP berhasil merealisasikan PNBP sebesar Rp990.971.187.740,28, atau sebesar 106,01% dari target awal yaitu Rp934.749.673.000,00. Tercapainya Target PNBP dalam DIPA dengan tetap memperhatikan arahan dari Dewan Pengawas untuk tidak menaruh dana pada investasi yang memiliki resiko tinggi. Selain itu, LPDP juga berhasil menyusun SOP Penempatan Dana pada Surat Berharga Negara, dan mendapatkan tambahan dana *endowment* sebesar Rp500.000.000,00 dari CSR Bank BTN.

### 3. Sasaran Strategis (SS) 3 : Pencapaian Target Penerima Layanan

*Indikator Kinerja Utama (IKU):* Persentase Pencapaian Target Penerima Layanan.

Capaian pada IKU ini sebesar 156,06%. Dari target penerima beasiswa sejumlah 1.455 orang, LPDP dapat menyalurkan beasiswa kepada 1.555 orang, atau sebesar 106,86 % dari target tahunan. Pada Layanan Riset Pembangunan Indonesia, LPDP dapat menjaring 40 proposal yang lulus seleksi substansi atau sebesar 142,86% dari target awal 28 proposal.

### 4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Perencanaan yang handal

*Indikator Kinerja Utama (IKU):* Persentase Realisasi Anggaran Program.

Pada IKU Persentase Realisasi Anggaran Program, dari target 85% atau sebesar Rp368.161.880.000,00 LPDP berhasil mencapai target sebesar Rp102.137.345.306,00 atau sebesar 32,64%. Rendahnya capaian IKU ini disebabkan keterlambatan proses seleksi beasiswa yang sedianya dimulai pada triwulan IV 2012, namun persetujuan Dewan Penyantun baru diperbolehkan pada bulan Maret 2013, sehingga seleksi baru bisa dimulai pada bulan April 2013.

### 5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Seleksi yang akurat

*Indikator Kinerja Utama (IKU):* Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Proses Seleksi.

Pada SS Seleksi yang akurat memiliki 1 IKU yaitu Ketepatan Waktu Penyelesaian Proses Seleksi. IKU berstatus hijau, dari target 100%, LPDP mampu menepatinya 100%. Berikut waktu capaian Layanan Beasiswa dan Layanan Pendanaan Riset:

Waktu Capaian Layanan Beasiswa

Pencapaian	Waktu Capaian Layanan Beasiswa					
	Proses Seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia (Tahun 2013)					
	Batch 5		Batch 6		Batch 7	
	Admin	Wawancara	Admin	Wawancara	Admin	Wawancara
Tanggal	17 Sept	27 Sept	29 Okt	22 Nov	27 Nov	12 Des
Realisasi	9 hari efektif		19 hari efektif		12 hari efektif	
Target	22 hari efektif					

Waktu Capaian Layanan Pendanaan Riset

Pencapaian	Waktu Capaian Layanan Pendanaan Riset					
	Proses Seleksi Riset Pembangunan Indonesia					
	Batch I			Batch II		
	Administra si	Substansi	Visitasi	Administrasi	Substansi	Visitasi
Tanggal	8-12 Apr	15-17 Apr	13-22 Mei	9-13 Sept	1-12 Okt	-
Realisasi	5 hari	3 hari	8 hari	5 hari	9 hari	-
Target	22 hari			22 hari		

**6. Sasaran Strategis (SS) 6: Penyelesaian (Settlement) yang Akurat**

*Indikator Kinerja Utama (IKU):* Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis dalam Penyaluran Dana

Pada tahun 2013, LPDP memiliki 7 Inisiatif Strategis (IS) guna mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Dari 7 IS tersebut, 7 IS (semuanya) dinyatakan selesai, sehingga capaian pada IKU ini adalah 100%. Berikut penjelasan mengenai capaian IS LPDP:

No	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	UIC	Periode Pelaks.	Status	Ket.
1	Peningkatan Kredibilitas Lembaga	Penyempurnaan Standar Pelayanan Minimum	Dokumen Standar Pelayanan Minimum	Dir.Keuangan dan Umum	Juni	Selesai	Telah diselesaikan
		Penetapan Sistem Akuntansi	Sistem Akuntansi	Dir. Keuangan dan Umum	Juni	Selesai	Telah diselesaikan
2	Pencapaian Target PNBPN	Penyempurnaan Pedoman Investasi LPDP	Pedoman Investasi LPDP	Dir.Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana	Juni	Selesai	Telah disempurnakan pedoman investasi deposito, sedangkan pedoman investasi sukuk/obligasi sedang disusun
		Pelaksanaan Investasi Obligasi/Sukuk Negara dan Deposito	Peningkatan imbal hasil/pendapatan Hasil Pengelolaan DPPN (Output: Laporan Realisasi PNBPN)	Dir.Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana	Tanggal 10 setiap bulannya	Selesai	Laporan disampaikan sesuai rencana, yaitu maksimal tgl10 bulan berikutnya

No	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	UIC	Periode Pelaks.	Status	Ket.
3	Pencapaian Target Penerima Layanan	Pengkomunikasian/sosialisasi LPDP kepada masyarakat Indonesia baik melalui media cetak, on line, dan/atau audio visual secara rutin dan/atau bertepatan dengan momentum peristiwa tertentu	Penerima layanan sesuai dengan target	Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana	Mei-Des	Selesai	Sosialisasi massive setelah launching
4	Pelaksanaan Anggaran yang Optimal	Menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Penyerapan Anggaran	Rencana kerja	Direktorat Keuangan dan Umum	Januari dan Juli	Selesai	
			Laporan Realisasi Penyerapan anggaran		Setiap Triwulan	Selesai	

## 7. Sasaran Strategis (SS) 7 : Efektifitas Monitoring dan Evaluasi

*Indikator Kinerja Utama (IKU):* Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimum Layanan Program

Pada Tahun 2013, IKU Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimum Layanan Program ditargetkan 80%, terealisasi 95,76%, sehingga capaian IKU ini adalah 119,7%. Rincian dari target, realisasi dan cara perhitungan sebagai berikut:

No	Program Studi	Target s.d Q4	Realisasi	Deviasi
1.	Teknik	25%	27,2%	2,2%
2.	Sains	20%	24,3%	4,3%
3.	Hukum	10%	5,6%	4,4%
4.	Pertanian	15%	7,5%	7,5%
5.	Akuntansi dan Keuangan	10%	8,62%	1,38%
6.	Sosial Agama	10%	14,53%	4,53%
7.	Bidang lain (Kedokteran, Farmasi, Kesmas)	10%	12,1%	2,1%
	Total	100%	100%	26,41%

Secara umum, tidak ada hambatan berarti dalam pencapaian IKU ini. Komposisi target program studi yang ditetapkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan skala prioritas penerima beasiswa. Namun pada pelaksanaannya, pendaftar dengan tujuan program studi sosial agama cukup banyak. Dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas, kami mempertimbangkan aspek proposionalitas sehingga pada realisasi program studi sosial agama mencapai 14,35%, lebih besar dari target awal yaitu 10%. Selain itu, realisasi target pada program studi pertanian terbilang rendah, hanya 7,5% dari target awal 10%. Untuk mengatasi hal ini, kami proaktif untuk melakukan sosialisasi ke kampus-kampus berbasis pertanian, seperti IPB. Kami juga membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan IPB. Harapannya sosialisasi dan Nota Kesepahaman ini dapat meningkatkan pendaftar dengan tujuan program studi pertanian, dan pada akhirnya kemungkinan terpenuhinya target capaian program studi pertanian akan menjadi lebih besar.

Tahun 2013 adalah tahun pertama LPDP membuka layanan. Capaian target per program studi pada Tahun 2013, dapat dijadikan acuan dalam menentukan target capaian per program studi pada tahun 2014.

## **8. Sasaran Strategis (SS) 8 : SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi**

### **a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Jumlah SOP/Pedoman Kerja Baru yang Ditetapkan**

Sampai dengan 31 Desember 2013 LPDP sudah menerbitkan 6 Kepdirut yang menetapkan 43 dokumen SOP, dari 41 dokumen SOP yang ditargetkan. Sehingga capaian IKU ini mencapai 104,9%. Adapun rincian atau penjelasan Perdirut dan Dokumen mengenai SOP, sebagai berikut:

#### **A. Keputusan Direktur Utama No.04/LPDP/2013 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Penyaluran Dana Beasiswa di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan**

1. Tersusunnya SOP penyusunan Pedoman Pemberian Beasiswa: SOP-01/LPDP/2013
2. Tersusunnya SOP Penerimaan Calon Penerima Beasiswa: SOP-02/LPDP/2013
3. Tersusunnya SOP Seleksi Calon Penerima Beasiswa: SOP-03/LPDP/2013

4. Tersusunnya SOP Penyaluran Dana Beasiswa: SOP-04/LPDP/2013
  5. Tersusunnya SOP Monitoring Penyaluran Dana Beasiswa: SOP-05/LPDP/2013
  6. Tersusunnya SOP Evaluasi Kebijakan Pemberian Dana Beasiswa: SOP-06/LPDP/2013
  7. Tersusunnya SOP Program Pengayaan Penerima Beasiswa: SOP-07/LPDP/2013
- B. Keputusan Direktur Utama No.05/LPDP/2013 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Pengelolaan Dana Riset Inovatif-Produktif (RISPRO) di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
1. Tersusunnya SOP Penyusunan Kebijakan Riset Inovatif-Produktif (RISPRO) : SOP-08/LPDP/2013
  2. Tersusunnya SOP Pedoman Bantuan Dana Riset Inovatif-Produktif (RISPRO) : SOP-09/LPDP/2013
  3. Tersusunnya SOP Penyusunan Pedoman Penghargaan Karya Riset Inovatif-Produktif (RISPRO): SOP-10/LPDP/2013
  4. Tersusunnya SOP Seleksi Proposal Bantuan Dana Riset Inovatif-Produktif (RISPRO): SOP-11/LPDP/2013
  5. Tersusunnya SOP Seleksi Proposal Penghargaan Karya Riset Inovatif-Produktif (RISPRO): SOP-12/LPDP/2013
  6. Tersusunnya SOP Penetapan Calon Penerima Bantuan Dana Riset Inovatif-Produktif (RISPRO): SOP-13/LPDP/2013
  7. Tersusunnya SOP Penetapan Calon Penerima Penghargaan Karya Riset Inovatif-Produktif (RISPRO): SOP-14/LPDP/2013  
penghargaan karya riset : SOP-16/LPDP/2013
  8. Tersusunnya SOP Penyaluran bantuan dana riset: SOP-15/LPDP/2013
  9. Tersusunnya SOP Penyaluran dana Tersusunnya SOP Monitoring pendanaan RISPRO LPDP: SOP-17/LPDP/2013

10. Tersusunnya SOP Evaluasi Kebijakan dan pedoman dana riset:  
SOP-18/LPDP/2013
- C. Keputusan Direktur Utama No.07/LPDP/2013 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Pengelolaan Dana Rehabilita Fasilitas Pendidikan di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
1. Tersusunnya SOP Penyusunan kebijakan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan: SOP-19/LPDP/2013
  2. Tersusunnya SOP Penyusunan pedoman dana rehabilitasi fasilitas pendidikan: SOP-20/LPDP/2013
  3. Tersusunnya SOP Analisis calon penerima dana rehab: SOP-21/LPDP/2013
  4. Tersusunnya SOP Penetapan calon penerima bantuan dana rehabilitasi fasilitas pendidikan: SOP-22/LPDP/2013
  5. Tersusunnya SOP Penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan : SOP-23/LPDP/2013
  6. Tersusunnya SOP Monitoring penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan: SOP-24/LPDP/2013
  7. Tersusunnya SOP Evaluasi kebijakan dan pedoman dana rehabilitasi fasilitas pendidikan: SOP-25/LPDP/2013
- D. Keputusan Direktur Utama No.08/LPDP/2013 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Kerumahtanggaan di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
1. Tersusunnya SOP Penggunaan Kendaraan Dinas: SOP-26/LPDP/2013
  2. Tersusunnya SOP Perawatan Kendaraan Dinas: SOP-27/LPDP/2013
  3. Tersusunnya SOP Distribusi ATK/APK: SOP-28/LPDP/2013
  4. Tersusunnya SOP Pemeliharaan Gedung: SOP-29/LPDP/2013
  5. Tersusunnya SOP Layanan Perbaikan: SOP-30/LPDP/2013
  6. Tersusunnya SOP Pengelolaan K3: SOP-31/LPDP/2013

7. Tersusunnya SOP Penyusunan Laporan SIMAK BMN: SOP-32/LPDP/2013
- E. Keputusan Direktur Utama No.06/LPDP/2013 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Ketatausahaan di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
1. Tersusunnya SOP Pengelolaan Dokumen: SOP-33/LPDP/2013
  2. Tersusunnya SOP Penerimaan Tamu: SOP-34/LPDP/2013
  3. Tersusunnya SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar: SOP-35/LPDP/2013
  4. Tersusunnya SOP Rapat Internal Direktorat: SOP-36/LPDP/2013
  5. Tersusunnya SOP Rapat Dewan Direksi: SOP-37/LPDP/2013
  6. Tersusunnya SOP Rapat Dewan Pengawas: SOP-38/LPDP/2013
  7. Tersusunnya SOP Rapat Dewan Penyantun: SOP-39/LPDP/2013
- F. Keputusan Direktur Utama No.09/LPDP/2013 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Tata Kelola Pegawai (Bagian 1) di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
1. Tersusunnya SOP Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan Pegawai: SOP-40/LPDP/2013
  2. Tersusunnya SOP Terminasi: SOP-41/LPDP/2013
  3. Tersusunnya SOP Pelatihan dan Pengembangan: SOP-42/LPDP/2013
- b. *Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Penyelesaian Good Corporate Governance (GCG) Charter*
- Pada tahun 2013, LPDP menargetkan terselesaikannya 1 draft Good Corporate Governance, sampai dengan akhir tahun 2013, LPDP berhasil menyelesaikan draft GCG Charter. Sekarang draft GCG Charter sedang menunggu pembahasan dan persetujuan dengan Dewan Pengawas. Pada tahun 2014, LPDP menargetkan untuk mengimplementasikan GCG Charter yang sudah disepakati bersama.
- c. *Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Persentase Implementasi Sistem Pengelolaan Kinerja.*

Sampai dengan akhir Desember 2013, IKU Persentase Implementasi Sistem Pengelolaan Kinerja ini dapat direalisasikan sesuai dengan target pada awal tahun yaitu 100%. LPDP sudah memiliki Sistem Manajemen Kinerja yang diadopsi dari Sistem Pengelolaan Kinerja yang ada di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2013, LPDP juga sudah mengajukan remunerasi dan pengajuan remunerasi LPDP sudah disetujui Menteri Keuangan melalui KMK Nomor 440/KMK.05/2013 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

d. *Indikator Kinerja Utama (IKU) 4: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Penugasan/Instruksi Pimpinan*

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rapat Pimpinan adalah persentase jumlah tindak lanjut rapat pimpinan yang sudah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah tindak lanjut yang harus diselesaikan. Sampai dengan akhir 2013, total terdapat 5 DAMS Setjen, 13 DAMS Kementerian, dan 18 DAMS Gabungan. Semua DAMS dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

e. *Indikator Kinerja Utama (IKU) 5: Persentase Mitigasi Risiko yang selesai Dilaksanakan.*

Pada tahun 2013, LPDP menargetkan capaian 90% pada IKU ini, dan sampai dengan akhir 2013 LPDP dapat mencapai 96,55% dengan nilai capaian/ indeks sebesar 107%. Berikut penjelasan / rincian mengenai IKU Persentase Mitigasi Risiko yang selesai Dilaksanakan:

<b>UIC Mitigasi</b>	<b>Jumlah Rencana Mitigasi</b>	<b>Jumlah Mitigasi Terlaksana</b>	<b>% mitigasi per bagian</b>
Dit. Keuangan dan Umum	27	23	85%
Dit. Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana	8	8	100%
Dit. Dana Kegiatan Pendidikan	3	3	100%
Dit. Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	5	5	100%

**9. Sasaran Strategis (SS) 9 : Perwujudan SDM yang berkompentensi tinggi**

*Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jmlat.*

Sampai dengan akhir tahun 2013, realisasi persentase pegawai LPDP yang memenuhi standar jamlat yaitu sebesar 83,78%, dimana jumlah SDM aktif di LPDP sampai adalah sebanyak 37 orang dengan jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat berjumlah 26 orang, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama pelatihan	Peserta
1	Capacity Building Internalisasi Nilai dan Budaya Kerja LPDP	53 orang
2	Pembinaan Mental Pegawai (Rutin)	68 orang
3	Pelatihan Bahasa Inggris EF	13 orang
4	Advance Excell	24 orang
5	Service Excellence	25 orang
6	Pelatihan Orientasi Pegawai Baru LPDP	19 orang
7	Sharing Knowledge	45 orang
8	Personnal Transformation Training Program	68 orang
9	Pola Pengelolaan Keuangan BLU	1 orang
10	Investasi Keuangan	2 orang
11	Pelatihan Fix Income and Bond	2 orang
12	Activity Based Costing: Concept and Application	5 orang
13	Effective Budget Costing	3 orang
14	Updating PPh 21	3 orang
15	Pelatihan Keselamatan Mengemudi oleh POLDA	8 orang
16	General Affair Professional	3 orang
17	Certified General Affairs Management	1 orang
18	Certified Human Resources Professional	1 orang
19	Certified NLP Practitionair	1 orang
20	Legal Drafting	3 orang

#### 10. Sasaran Strategis (SS) 10 : Perwujudan tata kelola TIK yang efektif

*Indikator Kinerja Utama (IKU):* Jumlah Modul Sistem Informasi yang Mendukung Proses Bisnis.

Pada tahun 2013, LPDP menargetkan 9 modul Sistem Informasi, sampai dengan akhir 2013 LPDP berhasil menyelesaikan 9 modul Sistem Informasi, sehingga indeks capaian IKU sebesar 100%. Adapun nama modul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modul Pendaftaran Beasiswa.

2. Modul Dashboard Admin Beasiswa.
3. Modul Dashboard Reviewer Beasiswa.
4. Modul Dashboard Psikolog/Interviewer Beasiswa.
5. Modul Dashboard Pendaftaran Beasiswa.
6. Modul Seleksi Beasiswa.
7. Modul Pendaftaran Riset Pembangunan Indonesia.
8. Modul Dashboard Admin Riset Pembangunan Indonesia.
9. Modul Dashboard User Riset Pembangunan Indonesia.

#### 11. Sasaran Strategis (SS) 11 : Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

- a. *Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase Penyerapan DIPA LPDP (Non Belanja Pegawai dan Non Belanja Program).*

Target IKU Persentase Penyerapan DIPA LPDP (Non Belanja Pegawai dan Non Belanja Program) sebesar Rp44.363.108.700,00, terealisasi sebesar Rp40.524.612.516 atau 86,78%. IKU ini tidak mencapai target dikarenakan LPDP melakukan efisiensi dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis yang semula manual menjadi online (automasi layanan).

- b. *Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA LPDP*

Target IKU Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA LPDP adalah sebesar Rp6.810.086.64,00, dan terealisasi sebesar Rp6.154.784.670,00. Tidak tercapainya target IKU ini disebabkan karena LPDP melakukan efisiensi dalam hal pencapaian output, dengan output yang sama LPDP menghabiskan input yang lebih kecil atau sedikit. Berikut rincian belanja modal LPDP:

No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Rencana Output		Realisasi Output		
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Dana (Rp)
1	Kendaraan Bermotor	1.856.000	11	Unit	11	Unit	1.827.079,60
2	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	623.258	97	Unit	94	Unit	488.440,44
3	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.711.180	218	Unit	200	Unit	1.599.555,45

4	Gedung / Bangunan	2.758.630	802	m <sup>2</sup>	802	m <sup>2</sup>	2.239.709,19
	Total	6.949.068					6.154.784,67

## C. KINERJA LAINNYA

### 1. Rekrutmen

Pada tahun 2013, telah ditetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas LPDP, yaitu:

1. Prof. DR. Ainun Na'im (Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Ketua Merangkap Anggota.
2. Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc. (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan) selaku Anggota
3. Sumiati, AK., M.F.M. (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan - Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) selaku Anggota
4. Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Sc., Ph.D. (Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Keuangan) selaku Anggota.

Di samping keempat orang tersebut, telah diusulkan pula satu orang calon anggota Dewan pengawas dari Kementerian Agama melalui NDR-6/LPDP/2013 tanggal 20 Agustus 2013 hal Usulan Penetapan Dewan Pengawas LPDP.

Direksi LPDP juga telah ditetapkan, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum (Direktur KU) dan Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana (Direktur PUPD). Ketiganya berasal dari Kementerian Keuangan. Sedangkan Direktur Dana Kegiatan Pendidikan (Direktur DKP) dan Direktur Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan (Direktur DRFP) berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kelima anggota Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 325-328/KMK.01/2012 tanggal 8 Oktober 2012.

Pada level Kepala Divisi, telah ditetapkan empat orang Kepala Divisi pada Direktorat KU dan pada Direktorat PUPD, masing-masing dua orang. Semua Kepala Divisi tersebut berasal unsur Kementerian Keuangan. Ketiga Kepala Divisi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 391-392/KMK.01/2012 tanggal 20 Nopember 2012.

Sedangkan empat Kepala Divisi pada Direktorat DKP dan DRFP telah melaksanakan tugas di LPDP sebanyak 3 orang namun penetapannya sampai dengan akhir Desember 2013 masih dalam proses. Adapun Kepala Satuan Pemeriksaan Internal ada, dan bekerja sejak Desember 2013.

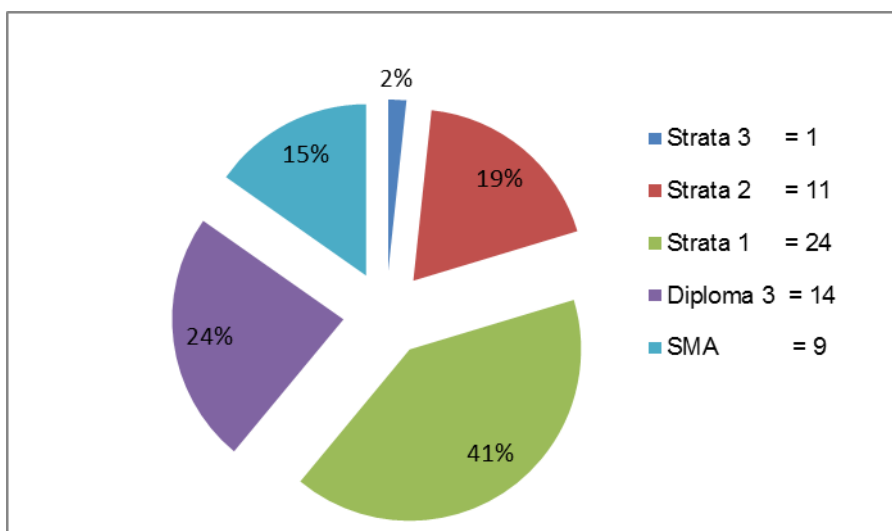
Untuk memenuhi kebutuhan staf telah dilaksanakan seleksi staf, baik dari PNS maupun Non-PNS. Staf PNS diperoleh dari lulusan STAN sebanyak 3 orang. Di luar itu, LPDP juga melaksanakan seleksi pada bulan April - Mei 2013 dan diperoleh 3 orang PNS dari eselon satu di luar Sekjen Kementerian Keuangan. Hanya saja, proses alih tugas ketiga PNS tersebut memakan waktu yang lama, sehingga baru dapat melaksanakan tugas bulan November 2013.

Memperhatikan proses alih tugas staf PNS sangat lama, harus dilakukan rekrutmen dari Non-PNS untuk mengisi pegawai profesional. Proses rekrutmen tersebut dilaksanakan dengan seleksi wawancara dan bila diperlukan dilaksanakan seleksi tertulis dan tes psikologi.

## **2. Komposisi SDM**

Di lihat dari komposisi pendidikan, dari 69 orang pegawai LPDP, sebagian besar memiliki pendidikan Strata Satu sebanyak 24 orang atau sekitar 24%, disusul Diploma Tiga sebanyak 14 orang atau 41%, baru kemudian Strata Dua sebanyak 11 orang atau 19%, SMA sebanyak 9 orang atau 15% dan Strata Tiga sebanyak 1 orang atau 2 %. Komposisi pendidikan pegawai tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Komposisi Pegawai LPDP berdasarkan Tingkat Pendidikan



### 3. Organisasi

LPDP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pada tahun 2013, telah disusun beberapa kelengkapan tata kelola organisasi, antara lain:

1. Rencana Strategis LPDP tahun 2012 - 2016
2. Good Corporate Governance Charter
3. Pedoman Seleksi Beasiswa dan Riset
4. Kebijakan Penyaluran Beasiswa dan Riset
5. Kebijakan Investasi
6. Modul Human Resources Integrated System sebanyak 6 modul, yaitu Accountability Map Matrix, Job Evaluation, Performance Management System, Reward management, Kamus Kompetensi, Job Grade, dan Job Description.
7. Standar Operasi dan Prosedur (SOP), sebanyak 42 buah, antara lain.

Pelatihan yang Telah Dilaksanakan pada Tahun 2013 per Direktorat

No	Direktorat	Jumlah SOP
----	------------	------------

1	Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan	7
2	Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	18
3	Direktorat Keuangan dan Umum	17
	Jumlah	42

Di samping itu, pada tahun 2013, juga telah diinisiasi penyusunan/perubahan peraturan, baik PP maupun PMK/PMK, antara lain:

1. Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang DPPN. Penyusunan PP tersebut diperlukan dengan pertimbangan, dari tahun 2010-2013, peraturan yang tertinggi yang mengatur DPPN adalah UU APBN, yang berubah setiap tahun, yang hanya menetapkan besaran DPPN. Untuk memberikan kepastian
2. KMK tentang Penyempurnaan Standar Pelayanan Minimum
3. KMK tentang Standar Akuntansi LPDP
4. KMK tentang Standar Biaya Beasiswa

#### 4. Data dan Sistem Informasi

Pada tahun 2013, LPDP telah membangun website sebagai media informasi terbatas mengenai kelembagaan dan program LPDP. LPDP juga telah mengembangkan *microsite* yang dirancang digunakan sebagai media penyebaran informasi/publikasi produk layanan LPDP, terutama beasiswa dan pendanaan riset. Pelaksanaan *hosting* untuk *microsite* tersebut dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2013 bersamaan dengan pelaksanaan pengumuman dibuka beasiswa dan pendanaan riset.

Untuk mendukung pelaksanaan penyaluran dana beasiswa dan riset telah dikembangkan beberapa aplikasi antara lain:

1. Sistem informasi pendaftaran beasiswa
2. Sistem informasi pengelolaan riset
3. Sistem informasi monitoring beasiswa
4. Sistem informasi monitoring riset
5. Aplikasi Workflow Document System untuk mendukung pengelolaan persuratan dan kearsipan
6. Aplikasi penyusunan surat tugas dan surat perjalanan dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan penyaluran beasiswa yang direncanakan dapat dilakukan, saat ini sedang dilakukan penyusunan *standar biaya* untuk beasiswa

siswa dan perhitungan akuntansi biaya untuk layanan beasiswa, riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Di samping telah disusun pula peringkat program studi pada 20 universitas terbaik dunia, sebagai dasar pembayaran insentif peringkat universitas.

## 5. Peralatan dan Fasilitas

Kantor LPDP pada saat ini berada di Gedung A.A. Maramis II Lantai 2 di kompleks perkantoran Kementerian Keuangan Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 1, Jakarta Pusat. Saat ini, ruangan yang ditempati LPDP merupakan bekas dari ruangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, sehingga desainnya belum memenuhi kebutuhan LPDP sebagai satuan kerja yang harus melayani masyarakat secara langsung. Agar sarana gedung sesuai dengan kebutuhan LPDP, pada tahun 2013 telah dilaksanakan pelaksanaan renovasi gedung LPDP. Sarana dan prasarana seperti meubel, air, kendaraan bermotor roda 4, kendaraan bermotor roda 2 dan peralatan pengolahan data dan komunikasi sudah dapat diselesaikan pada tahun 2013.

## D. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2013

Pada tahun anggaran 2013 alokasi untuk membiayai masing-masing program/kegiatan tidak menggunakan sumber pembiayaan Rupiah Murni, melainkan keseluruhannya bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini disebabkan status kepegawaian seluruh pegawai LPDP masih melekat pada masing-masing unit instansi asal pegawai dimaksud, sehingga pada anggaran LPDP tidak tercantum belanja pegawai yang umumnya menggunakan Rupiah Murni. Alokasi dan realisasi anggaran masing-masing output/kegiatan dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel berikut:

**Alokasi dan Realisasi Anggaran LPDP Tahun 2013**

	URAIAN	Pagu (dlm ribuan)	Blokir (dlm ribuan)	Non Blokir (dlm ribuan)	Realisasi Belanja (dlm ribuan)
001	Layanan Dukungan Manajemen	33.029.158.	0	33.029.158	29.516.778,29
002	Dokumen Analisis dan Evaluasi	1.202.340.	0	1.202.340	674.019,17
003	Laporan Hasil Verifikasi	368.161.880	68.027.126	300.134.754	102.137.345,31
994	Layanan Perkantoran	13.200.440	7.683.000	5.517.440	4.179.030,39
995	Kendaraan Bermotor	1.856.000	0	1.856.000	1.827.079,60

URAIAN		Pagu (dln ribuan)	Blokir (dln ribuan)	Non Blokir (dln ribuan)	Realisasi Belanja (dln ribuan)
996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	623.258	0	623.258	488.440,44
997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.711.180	0	1.711.180	1.599.555,45
998	Gedung/ Bangunan	2.758.630	0	2.758.630	2.239.709,19
Jumlah Total			422.542.886	75.710.126	346.832.760

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun Anggaran 2013.

Pengukuran kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun Anggaran 2013, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2013. Capaian rata-rata kinerja sasaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan = N/A
2. Persentase Pencapaian Target PNBPN dalam DIPA = 106,01%
3. Persentase Pencapaian Target Penerima Layanan = 156,06%
4. Persentase Realisasi Anggaran Program = 32,64%
5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Proses Seleksi = 100%
6. Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis dalam Penyaluran Dana = 100%
7. Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimum Layanan Program = 119,7%
8. Jumlah SOP/Pedoman Kerja Baru yang Ditetapkan = 104,9%
9. Penyelesaian *Good Corporate Governance (GCG) Charter* = 100%
10. Persentase Implementasi Sistem Pengelolaan Kinerja = 100%
11. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Penugasan/Instruksi Pimpinan = 117%
12. Persentase Mitigasi Risiko yang selesai Dilaksanakan = 107%
13. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat = 167,56%
14. Jumlah Modul Sistem Informasi yang Mendukung Proses Bisnis = 100%
15. Persentase Penyerapan DIPA LPDP (Non Belanja Pegawai dan Non Belanja Program) = 91,35%
16. Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA LPDP = 92,23%

Kendala utama dalam pencapaian kinerja tahun 2013 yaitu keterlambatan dalam pelaksanaan seleksi, hal ini dikarenakan persetujuan Dewan Pengawas baru didapatkan pada bulan Maret 2013, sehingga seleksi baru bisa dimulai pada bulan April 2013. Keterlambatan proses seleksi ini mengakibatkan anggaran program tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Keterlambatan proses seleksi yang mengakibatkan rendahnya realisasi anggaran program ini, menjadi bahan evaluasi LPDP guna menyusun rencana seleksi lebih baik. Penyusunan jadwal yang komprehensif juga diharapkan akan membuat biaya operasional menjadi lebih efisien.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2014  
Direktur Utama

Eko Prasetyo  
NIP. 197007121989121001

Unit Organisasi : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  
 Tahun Anggaran : 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi	1a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,02	3,97	98,76
		1b-CP	Persentase pencapaian target layanan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.	100%	143,84%	143,84
2.	Efektifitas Sosialisasi	2a-N	Tingkat pertumbuhan pendaftar	25%	64,86%	259,44
		2b-N	<i>Potential Market Awareness Index</i>	3 (skala 4)	4 (skala 4)	133,33
3.	Seleksi yang Akurat	3a-N	Jumlah peserta yang lulus seleksi administratif	4.062 Pendaftar	6.383 Pendaftar	157,14
		3b-N	Tingkat akurasi seleksi administratif	100%	100%	100
4.	Fasilitasi Penerima Layanan	4a-N	Ketepatan waktu penanganan komplain	100%	100%	100
		4b-N	Presentase pemenuhan SLA penyelesaian dokumen	100%	100%	100
5.	Efektifitas Monitoring dan Evaluasi	5a-N	Tingkat kelulusan tepat waktu	100%	100%	100
		5b-N	Tingkat kesesuaian prosedur layanan Dana Riset terhadap SOP	100%	100%	100
6.	SDM yang kompetitif	6a-N	Persentase kesesuaian diklat dengan Standar Kompetensi Teknis Jabatan	100%	98,1%	98,1
		6b-N	Tingkat implementasi SOP dan Peraturan Kepegawaian	100%	121%	121

7.	Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi	7a-CP	Indeks Kesehatan Organisasi	68	59	86,76
		7b-N	Persentase penyelesaian tindaklanjut penugasan / instruksi pimpinan yang tepat waktu	85%	On Track	117,64
8.	E-Corporate Services	8a-N	Tingkat implementasi Layanan Online Sistem Monitoring dan Evaluasi Layanan	100%	100%	100
		8b-N	Tingkat Implementasi sistem arsip secara elektronik	100%	100%	100
9..	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	9a-N	Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	95%	95,09%	100,09
		9b-N	Opini atas laporan keuangan	WTP (4)	WTP(4)	120

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp744.142.554.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp734.285.232.205

